

## Strategi dan Implementasi Kebijakan Program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa

*Strategy and Policy Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) Program for Poverty Alleviation in Villages*

Abd. Haris<sup>1</sup>, Ali Anas<sup>2\*</sup>, Muhammad Nurjaya<sup>3</sup>, Hermanu Iriawan<sup>4</sup>, Muh. Tang Abdullah<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia.

<sup>2</sup> Administrasi Negara, Universitas Bosowa Makassar, Indonesia.

<sup>3</sup> Universitas Muslim Maros, Indonesia.

<sup>4</sup> Administrasi Publik, IISIP Yapis Biak, Papua, Indonesia.

<sup>5</sup> Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

\*E-mail: [alianas@universitasbosowa.ac.id](mailto:alianas@universitasbosowa.ac.id)

### ARTICLE INFO

**Keywords:** Sustainability Development Goals; Policy Implementation; Poverty; Village Government; Institutional Capacity

**Kata kunci:** Sustainable Development Goals; Implementasi Kebijakan; Kemiskinan; Pemerintah Desa; Kapasitas Kelembagaan

**How to cite:**  
Haris, A., Anas, A., Nurjaya, M., Iriawan, H., & Abdullah, M. T. (2024). Strategi dan Implementasi Kebijakan Program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 10(1), 65-78

### ABSTRACT

*This research aims to find out the programme in alleviating poverty in an economic perspective through the SDGs in Bone Regency. By describing economic equality, equitable access to services and providing guarantees for disasters that will have an impact on the economic losses of the community. The method used in this research is a qualitative approach by describing the SDGs programme in alleviating poverty in Bone Regency, Massangkae Village. The data collection process was carried out by means of observation, interviews with key informants and documentation. Thus, the research results show that the village government has made efforts to alleviate poverty that occurs with strategic steps through increasing the income of underprivileged communities; providing guarantees and ease of access to services in the village government; providing guarantees and protection of the community from various disaster threats; with several indicators so that the village government has a very strong role in improving community welfare. However, the implementation of these policies still requires coordination across stakeholders who have links and authority because poverty is a multidimensional problem. Meanwhile, the implications of this research in the future are expected to be carried out in a more comprehensive study, especially the methods used with research locations that reach a larger area.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program dalam mengentaskan kemiskinan dalam perspektif ekonomi melalui

SDGs Di Kabupaten Bone. Dengan mendeskripsikan pemerataan ekonomi, akses pelayanan yang merata serta memberikan jaminan atas terjadinya bencana yang akan berdampak pada kerugian secara ekonomi masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan program SDGs dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bone Desa Massangkae. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan informan kunci dan melakukan dokumentasi. Dengan demikian maka diperoleh hasil penelitian bahwa pemerintah Desa telah melakukan upaya dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi dengan langkah strategis melalui peningkatan pendapatan masyarakat kurang mampu; memberikan jaminan dan kemudahan dalam mengakses pelayanan pada pemerintahan desa; memberikan jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman bencana; dengan beberapa indikator tersebut sehingga pemerintah desa memiliki peranan yang sangat kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam implementasi kebijakan tersebut masih membutuhkan koordinasi lintas stakeholder yang memiliki keterkaitan dan kewenangan karena kemiskinan merupakan masalah secara multidimensi. Sementara itu implikasi penelitian ini kedepan diharapkan agar dilakukan kajian secara lebih komprehensif terutama metode yang digunakan dengan lokasi penelitian yang menjangkau daerah yang lebih besar.

---

## Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi suatu isu utama bagi negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan ini menjadikan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kendati demikian kemiskinan antara satu negara dengan negara lain memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki indikator dan karakteristik yang berbeda-beda pula. Data kemiskinan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau *basic needs approach*. Masyarakat kehilangan kesejahteraan akibat kemiskinan, ketidakmampuan dalam memenuhi hak dasar dan pendapatan perkapita dibawah rata-rata perbulan. Kemiskinan pada umumnya berkaitan dengan ekonomi yang menyebabkan gagalnya memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan (Syahputra, 2021).

Dengan melihat bahwa kemiskinan dari berbagai multidimensi atau yang biasa di istilahkan dengan *Multidimension Poverty Approach* (MPA). Kemiskinan dapat dilihat dari indikator kesehatan yang buruk, minimnya pendidikan, standar hidup yang kurang memadai, minimnya pendapatan, kualitas kerja yang buruk, ketidakberdayaan serta rentan terjadinya kekerasan. Dengan ragam persoalan kemiskinan tersebut membutuhkan pendekatan kebijakan yang dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bone (Hasan Warso Syahputra, 2021).

Lebih lanjut, Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu program yang berorientasi pada pembangunan khususnya pembangunan manusia.

hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa negara maju, berkembang dan tertinggal memiliki hak yang sama dalam proses pembangunan, akses pelayanan dan juga perlindungan dari terjadinya bencana. Dengan adanya program SDGs maka masyarakat desa dapat mengidentifikasi karakteristik serta prioritas sesuai dengan tingkat permasalahan yang sedang dialami oleh masyarakat. dengan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat di Desa Massangkae nantinya akan memajukan kesejahteraan di desanya.

Agenda SDGs pada pembangunan sektor ekonomi di desa fokus pada tujuan program berikut, yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memberikan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak bagi semua; membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan dalam mendorong inovasi; mengurangi terjadinya kesenjangan intra dan antar negara; memberikan jaminan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; memberikan penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan secara berkelanjutan, memberikan persediaan dalam mengakses keadilan bagi semua, terbentuknya sistem kelembagaan yang mampu diakses secara efektif, insklusif pada berbagai tingkatan (Hasan Warso Syahputra, 2021); (Solomon et al., 2022).

Dalam perkembangannya program SDGs dalam prakteknya seringkali dianggap tidak terbuka, dimana yang menjadi sasaran adalah negara dengan tingkat kemandirian dan kemajuan mendominasi ekonomi secara global (Woodbridge ,2015). Program SDGs terdiri atas 169 sasaran dan 241 indikator yang saling berkaitan satu sama lain. Dukungan kebijakan ini sejalan dengan arahan presiden Joko Widodo, 12 Oktober 2019 yang menegaskan bahwa dana desa harus mampu dirasakan oleh masyarakat kebermanfaatannya. Selain itu dana desa juga harus mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan ekonomi di desa yang selanjutnya ditegaskan melalui Perpres No.59 Tahun 2017, maka di susunlah SDGs Desa. SDGs Desa merupakan turunan dari implementasi SDGs global di Indonesia yang sebelumnya sudah diratifikasi oleh Bappenas RI yang telah menyusun dokumen perencanaan berupa metadata indikator pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 59 Tahun 2017. Dengan adanya SDGs Desa, Pemerintah mengharapkan adanya kontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Linggarwati et al., 2021).

Olehnya itu, keberadaan program SDGs dimaksudkan sebagai stimulus dalam mengembangkan dan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, dengan agenda utama yakni pemberdayaan masyarakat dan membantu masyarakat untuk memberdayakan diri dan mendapatkan penghasilan yang pada akhirnya mendapatkan penghasilan yang layak. Dengan demikian ekonomi masyarakat akan mengalami peningkatan dan secara berkesinambungan akan keluar dari predikat miskin. (Linggarwati et al., 2021)

Lebih lanjut konsep SDGs yang di kembangkan pada desa menitikberatkan pada pembangunan harus mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa tanpa terkecuali melalui 18 agenda tujuan pembangunan. Adapun kedelapan tipe

Desa adalah sebagai berikut Siswanto (2021) dalam (Zaini, 2021) (1) Desa tanpa Kemiskinan dan Kelaparan; (2) Desa Ekonomi Tumbuh Merata; (3) Desa Peduli Kesehatan; (4) Desa Peduli Lingkungan; (5) Desa Peduli Pendidikan; (6) Desa Ramah Perempuan; (7) Desa Berjejaring; (8) Desa Tanggap Budaya. Kabupaten Bone sebagai Daerah dengan kepadatan penduduk cukup tinggi, sehingga pembangunan di orientasikan pada pedesaan. Pemerintah Kabupaten Bone juga telah banyak menerapkan program-program pembangunan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.

Namun demikian, program-program ini belum memiliki strategi dan kebijakan yang tepat karena tidak langsung berpihak pada lapisan masyarakat yang paling miskin. Sehingga hal ini membuktikan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang menyangkut ekonomi dimana kesejahteraan masyarakat di desa dinilai masih kurang jika menggunakan indikator yang ditetapkan oleh SDGs.

Oleh sebab itu, maka dalam penelitian ini dilakukan penelitian terkait dengan implementasi program SDGS pada Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Hal ini karena jumlah penerima bantuan program pemerintah untuk masyarakat miskin di desa Massangkae dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami kenaikan (lihat Tabel 1). Desa Massangkae memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.400 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 558 KK berdasarkan data skunder Desa Massangkae (Bakri & , Bernard Sagrim , Andi Sutra Rimba, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa program pengentasan kemiskinan di Desa Massangkae masih belum berjalan efektif.

**Tabel 1.** Data Penduduk Berdasarkan Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2021

No	Tahun	PKH	BPNT	Jumlah KK
1.	2018	139	287	426
2.	2019	145	294	439
3.	2020	148	320	468
4.	2021	176	324	500

*Sumber: Pemerintah Desa Massangkae (2022)*

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk melihat proses implementasi program SDGs Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengentaskan kemiskinan, dengan studi kasus di Desa Massangkae, Kabupaten Bone.

## Kajian Literatur

Implementasi suatu kebijakan memang telah disadari bukanlah suatu hal mudah, sebab beragam kepentingan yang ada untuk dapat diakomodir. Kadangkala suatu kebijakan telah melalui suatu proses perencanaan yang matang belum tentu dapat di implementasikan dengan baik. Penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Elih Yuliah, 2020) yakni *A model*

of the policy implementation process. Sebuah model dalam proses implementasi kebijakan menekankan pada sasaran dan juga standar yang hendak dicapai oleh pelaksana kebijakan, kemudian untuk menilai sasaran tersebut melalui kinerja suatu kebijakan. Sehingga konsep dari Van Meter dan Van Horn ini dianggap relevan dengan program Desa tanpa kemiskinan pada Desa Massangka Kabupaten Bone.

Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Handoyo (2012). Kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan suatu program guna mencapai tujuan yang ingin dicapai, kebijakan juga menjadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik tertentu. Hal ini sejalan dengan program kegiatan SDGs yang dicanangkan di Kabupaten Bone dimana masyarakat masih banyak yang termasuk dalam kategori miskin. Sementara itu, menurut Dafid Easton (1913) (Anas & Abdullah, 2021). "*public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*". Kemudian ditegaskan lebih mendalam oleh Edwards III & Ssharkansky (1978) sebagaimana dikutip oleh (Akib, 2010) bahwa "*public policy is what government say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government programs*". Serta Lasswell & Kaplan (1970). *Public policy is a projected program of goals, values and practices*". Dari uraian berdasarkan pada pendapat ahli yang di rujuk oleh penulis bahwasannya kebijakan merupakan suatu tindakan baik yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah guna memecahkan masalah publik yang beraikan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Suatu kebijakan publik tidak berhenti dengan adanya suatu program, akan tetapi kebijakan tersebut harus mampu dilaksanakan dalam bentuk program sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Udoji, 1981 dalam (Yuliah, 2020) yang kemudian mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting bahkan jauh lebih penting daripada membuat kebijakan itu sendiri. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Van meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh (Abdal, 2015) bahwa suatu implementasi kebijakan dapat dilihat melalui enam syarat berikut, yaitu 1) standar dan tujuan serta ukuran dari tujuan kebijakan yang ingin dicapai; 2) sumber daya keuangan; 3) karakteristik daripada organisasi yang menjadi pelaksana; 4) komunikasi yang terjalin antar organisasi dan dukungan penguatan dari lintas stakeholder; 5) sikap dari pelaksana; 6) kondisi ekonomi sosial dan politik. Kemudian untuk memastikan bahwa suatu implementasi kebijakan tercapai dengan baik perlu memperhatikan hal-hal seperti: 1) ketetapan suatu kebijakan; 2) ketetapan pelaksana; 3) adanya target yang telah ditetapkan; 4) kondisi lingkungan yang menjadi fokus pelaksanaan program implementasi kebijakan.

Kebijakan pelaksanaan program SDGs, mengacu pada prioritas anggaran dana Desa pada tahun 2021 yang fokus pada pelaksanaan SDGs Desa melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2021 tentang prioritas pembangunan Desa pada tahun anggaran 2021 yang kemudian dikaitkan dengan 17 ditambah 1 agenda pelaksanaan SDGs Desa (Hubbah, 2021), kemudian dari 18

program tersebut maka dalam penelitian ini fokus pada prioritas pada bidang ekonomi, yang sesuai dengan tipologi Desa Massangkae yakni Desa dengan pertumbuhan perekonomian yang merata melalui peningkatan pendapatan penduduk; memberikan akses dan jaminan terhadap pelayanan secara merata; dan memberikan perlindungan terhadap resiko bencana yang mungkin akan terjadi (Dzulqarnain et al., 2022).

Sejalan dengan pemikiran Purwanto (2014) dan Rusmaniah (2021) dalam (Rizayani et al., 2022) mengungkapkan bahwa kemiskinan akan menimbulkan berbagai dampak dan sifatnya menyebar kedalam tatanan masyarakat secara meluas. Penelitian lain diungkapkan oleh Suharto, (2009) dalam (Rorong et al., 2018); Roidah, (2016); dan Annisa, (2020) sebagaimana yang dikutip dalam (Rizayani et al., 2022) yang meneliti terkait dengan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sengaja dihadirkan sebagai program untuk mengurangi beban bagi keluarga miskin. Lebih lanjut tujuan dari pemberian dana kepada keluarga akan dapat mendorong efektivitas dari program PKH dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi penerima bantuan (Kemensos, 2019). (Rizayani et al., 2022) Dalam studi yang dilakukan oleh SMERU, 2020 (Rizayani et al., 2022) juga menemukan bahwa program pengentasan kemiskinan memiliki manfaat yang lebih berguna bagi peningkatan kesejahteraan penerima bantuan.

Kendati demikian penerima seringkali di berikan kepada perempuan. Peran secara tradisional sebagai ibu rumah tangga membuatnya memahami tanggung jawabnya dalam mengelola dana yang diberikan. Hal ini ditegaskan dalam studi Hairudinor, (2020) (Rizayani et al., 2022) terkait dengan peluang dan tantangan serta harapan memiliki relasi yang cukup kuat sebagaimana juga penelitian (Rizayani et al., 2022) tentang dampak kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan menemukan bahwa program pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di kota Banjar Baru mampu mengubah pola pikir masyarakat yang semula tidak terlalu memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak, kini sudah mulai aktif dan sadar akan pentingnya kesehatan dan pendidikan bagi anak untuk masa depan yang lebih baik. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah Desa Massangkae dalam mengimplementasikan program SDGs Desa untuk mengentaskan kemiskinan di desa.

## **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan studi kasus untuk mendeskripsikan implementasi SDGs dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Massangkae, Kabupaten Bone. Pendekatan kualitatif dianggap relevan guna memberikan deskripsi secara mendalam kemudian jenis penelitian berupa data lisan dan tertulis sesuai dengan karakteristik dan perilaku yang menjadi objek pengamatan sebagai dikatakan Moeloeng (2001) (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek yang berkaitan dengan pelaksanaan program SDGs dalam bidang ekonomi dalam mengentaskan

kemiskinan. Data yang di gunakan terdiri data primer dan data sekunder, kemudian data dikumpulkan oleh peneliti di hubungkan dengan referensi yang berkaitan dengan kajian literatur, dokumen-dokumen yang relevan lainnya.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 10 dengan rincian sebagai berikut: 1) Kepala Desa; 2) Pejabat/Staf yang membidangi perencanaan; 3) OPD yang berkaitan dana tau yang terlibat dalam program SDGs; 4) warga Desa Massangkae. Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah daerah Kabupaten Bone pada Desa Massangkae, yang menjadi target pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui program SDGs di Kabupaten Bone.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan proses reduksi data yang dilakukan dengan menyalin semua hasil wawancara, pengamatan terkait lalu memilah dan memilih data yang relevan dengan objek penelitian untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk naratif, melakukan verifikasi dan dihubungkan dengan dokumentasi seperti jurnal buku dan referensi lain untuk mendukung hasil penelitian serta menarik kesimpulan penelitian. Penelitian ini pula dilakukan selama dua bulan untuk mendapatkan keakuratan data, terhadap objek penelitian (Arwildayanto et al., 2022).

## Hasil dan Pembahasan

### *Peningkatan Jumlah Penduduk*

Lazimnya kemiskinan disebabkan karena ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan. Dengan adanya program SDGs terdapat 18 indikator program prioritas dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bone pada Desa Massangkae. Implementasi kebijakan dari program diawali dengan proses input sampai menghasilkan *output* dan atau *outcomes* yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai konsep pembangunan berkelanjutan menjadi acuan melalui surat edaran kementerian desa terkait dengan pelaksanaan program SDGs bagi seluruh masyarakat desa di seluruh Indonesia. Dengan adanya surat edaran ini maka setiap Desa di dorong untuk mempercepat dan menekan angka kesenjangan sosial yang terjadi serta dapat menekan angka kemiskinan di Desa.

Lebih lanjut akan di uraikan hasil penelitian terkait dengan strategi implementasi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Desa Massangkae Kabupaten Bone dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Van meter dan Van Horn (1975) dalam (Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023) sebagai berikut.

### *Ukuran dan Tujuan Kebijakan*

Kebijakan yang baik harus menetapkan target dan tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Demikian juga dalam program pengentasan kemiskinan di Desa Massangkae, pemerintah desa menindaklanjuti hasil surat edaran kementerian

desa terkait implementasi SDGS desa. Keberadaan program ini memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat dan juga pemerintah Desa Massangkae. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang sudah mulai menyadari pentingnya permasalahan dan upaya dalam menangani permasalahan tersebut dengan melibatkan unsur lain selain pemerintah secara kolaboratif bukan hanya sekedar formalitas akan tetapi harus dapat di wujudkan dalam bentuk kegiatan secara nyata. Dari hasil analisis ditemukan bahwa tujuan dan ukuran dari mplementasi kebijakan telah dicapai oleh pelaksana kebijakan itu sendiri yakni kepala desa dan perangkat desa serta lintas instansi sebagaimana hasil wawancara dengan Informan SD yang juga Sekretaris Desa Massangkae sebagai berikut:

*“Pemerintah desa telah melakukan upaya serius untuk menjadikan Desa Massangkae sebagai desa tanpa kemiskinan, kita telah melakukan beberapa program secara terencana agar program ini dapat di ukur kinerja dan pencapaiannya melalui peraturan desa yang tertuang dalam APDes. Pemerintah desa telah mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Bone juga antusias dari masyarakat itu sendiri. Sekalipun harus kami akui bahwa masih ada kendala yang kami hadapi akan tetapi secara perlahan akan dilakukan perbaikan”* (Wawancara pada 11 Juli 2022)

Secara garis besar penduduk Desa Massangkae yang melaksanakan program SDGs di Kabupaten Bone cukup padat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.** Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Dusun Laggoppo I	Dusun Laggoppo II	Dusun Ellue	Dusun Hulo	Jumlah
1	Petani	78	82	200	125	485
2	Pedagang/Wiraswasta	15	21	10	15	61
3	PNS/TNI/POLRI	2	2	1	2	7
4	Karyawan Swasta	12	10	3	2	27
5	Nelayan	170	175	32	125	502
6	Tenaga Kontrak/Sukarela	5	1	5	2	13
7	Buruh/Tenaga Lepas	3	6	8	5	22
8	Pensiunan	2	1	2	0	5
9	IRT	194	196	103	130	623
10	Belum/Tidak Bekerja	305	289	141	197	932
	<b>TOTAL</b>	<b>786</b>	<b>783</b>	<b>505</b>	<b>603</b>	<b>2677</b>

*Sumber Data: Pemerintah Desa Massangkae (2021)*

Jika dilihat pada tabel diatas sebagian besar masyarakat bergantung pada mata pencaharian sebagai petani. Aktivitas ini tentu membutuhkan upaya dan strategi yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah Desa.

Terutama karena kondisi masyarakat desa tersebut terdapat 485 berprofesi sebagai petani, sementara yang belum bekerja yakni 932 orang. Hal ini tentu saja akan menjadi masalah dan menggantungkan hidupnya pada bantuan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterbatasan kemampuan keuangan desa dan daerah, serta minimnya kreativitas masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya ketergantungan tersebut. Sementara program pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas dari alokasi anggaran dana desa belum mampu menyentuh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi SDGs Desa di Kabupaten Bone, dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait mulai dari pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah dan aparat desa.

Dengan demikian diharapkan program SDGs ini kiranya mampu mengurangi kemiskinan yang ada di desa dengan peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses implementasi SDGs di Desa.

### *Sumberdaya*

Dari segi sumberdaya dalam mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan melalui SDGs Desa sudah cukup baik, namun masih ada kendala terkait dengan pemahaman dari pada penerapan SDGs masih perlu dilakukan kajian secara mendalam agar tepat sasaran. Sumberdaya manusia dengan kualitas yang baik diperlukan dalam implementasi program desa tanpa kemiskinan, kendati demikian kualitas juga perlu disesuaikan dengan keahlian dan juga pekerjaan sebagaimana telah di rumuskan dalam kebijakan yang dimaksud. Berdasarkan Hasil wawancara dari Informan AA selaku aparat desa yang menyatakan bahwa:

*“Pemerintah Desa sudah semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam melaksanakan program SDGS desa tanpa kemiskinan dan tentunya menjamin hak yang sama dalam kemudahan mengakses pelayanan.”*(Wawancara pada 11 Juli 2022)

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Informan B yang juga staf pemerintah Desa Massangkae menyatakan Bahwa:

*“Kemudahan pelayanan itu sepatutnya di dapatkan tiap-tiap Masyarakat, namun pelayanan itu tergantung dengan pemberi dan si penerima pelayanan sebab sifat yang di miliki tiap-tiap individu itu berbeda, serta kemudahan pelayanan itu tergantung urusan apa yang sedang di urus sebab ada berapa hal yang mesti berkasnya harus di lengkapi dan dibutuhkan waktu lama.”*(Wawancara pada 11 Juli 2022)

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas di temukan bahwa sumberdaya di Desa Massangkae sudah berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Walaupun juga disadari bahwa sumberdaya yang lain patut menjadi pertimbangan seperti sumberdaya keuangan, dan juga waktu. Sebab jika suatu program di dukung sumberdaya yang baik, namun tidak di dukung oleh penganggaran dan target penyelesaian tidak dapat ditentukan berdasarkan ketersediaan waktu maka tentu dampak dari implementasi suatu program akan sulit untuk diterima dengan baik (Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

### *Komunikasi antar organisasi*

Pada dimensi ini sistem komunikasi yang terbangun lintas organisasi dalam mengimplementasikan program SDGS desa tanpa kemiskinan sesuai dengan hasil penelitian belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan lintas instansi belum terbangun sistem pembagian kerja dalam bentuk kolaborasi dengan tugas dan kewenangan yang kemudian berbeda pula. namun memiliki keterkaitan yang saling bergantung. Seperti misalnya Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah hanya berfokus pada bagaimana program tersebut dapat di jalankan dan menjadi *draft* perencanaan yang di ajukan, sementara itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat mengalami kesulitan karena kewenangan sesungguhnya menjadi domain kepala desa sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki program yang berbeda sekaliupn lokasi di Desa Massangkae. Selain itu keuangan dan penganggaran dari keuangan daerah hanya bertumpu pada kemampuan APBdes tahun berjalan. Sehingga pengimplementasian program desa tanpa kemiskinan rawan terjadinya tumpang tindih.

### *Karakteristik agen pelaksana*

Dari segi pelaksanaan kegiatan dari program SDGs desa tanpa kemiskinan, Implementasi Kebijakan merupakan Aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) desa tanpa kemiskinan merupakan upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan pembangunan Desa termaksud soal Kemiskinan. Mengingat Surat Edaran Kementerian Desa tentang pelaksanaan program SDGs ini menjadi perhatian semua orang di desa khususnya di Desa Massangkae, di harapkan program ini bisa menekan angka kemiskinan dengan cepat dan menekan kesenjangan sosial di Desa Massangkae.

Berdasarkan wawancara dengan informan SD selaku Sekretaris Desa Massangkae pada tanggal 11 juli 2022 menyatakan bahwa:

*“Program SDGs ini telah di Implementasikan di Desa Massangkae pada bulan April 2021 sampai bulan Mei 2021 dengan di hadiri oleh kecamatan, pendamping Desa, Pemerintah Desa, dan Tokoh Masyarakat dengan menugaskan Nama-Nama untuk Pemukhtahiran data SDGs di Wilayah Desa Massangkae yang di lakukan dengan pendataan manual dan pengimputan Online.”* (Wawancara pada 11 Juli 2022)

Program SDGs ini tentunya mendapat respon yang baik dari pihak masyarakat terkait tentang pelaksanaan Program SDGs ini, baik yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan maupun pengawasan dari proses pengimplementasian SDGs ini.

### *Lingkungan ekonomi, sosial dan politik*

Apabila dilihat secara keseluruhan, jumlah penduduk di Desa Massangkae mencapai angka 2.400 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 558 KK. Dengan melihat jumlah penerima bantuan miskin dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami

kenaikan yang cukup tinggi, dapat di nilai bahwa pengetasan kemiskinan di Desa Massangkae masih di nilai belum baik.

Program SDGs ini mampu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Desa tergantung bagaimana pemerintah Desa mengelolah data SDGs yang harus di perbarui sekali dalam 3 bulan karna keberhasilan suatu program itu di ukur daripada bagaimana keseriusan pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam program itu sendiri. Ada tiga hal yang perlu di lakukan dalam pengimplementasian program SDGs di Desa Massangkae yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan sesuai dengan tujuan SDGs yaitu; 1) Meningkatkan pendapatan penduduk miskin; 2) Menjamin akses pelayanan Desa; 3) Melindungi masyarakat dari segala bentuk bencana.

Berdasarkan wawancara dengan Informan S selaku warga Desa Massangkae yang bertempat di Dusun Laggoppo bahwa:

*“SDGs Desa yang berfokus pada desa tanpa kemiskinan merupakan perhatian utama pemerintah Desa Massangkae untuk mengentaskan kemiskninan, potensi desa cukup menjanjikan karena kami berdekatan dengan pesisir laut sehingga dengan memaksimalkan potensi desa program tersebut kami optimis bisa memberikan nilai keberdayaan terhadap masyarakat. (Wawancara pada 20 juli 2022)*

Lebih lanjut, sebaran kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Massangkae dapat diliat pada tabel distribusi sebagai berikut :

**Tabel 3.** Jumlah Masyarakat Miskin selaku penerima Bantuan PKH dan BPNT 2021 di Desa Massangkae

No	Dusun	PKH	BPNT	Jumlah KK
1	Laggoppo I	47	92	139
2	Laggoppo II	41	84	125
3	Ellue	49	77	126
4	Hulo	39	71	110
<b>Jumlah</b>		<b>176</b>	<b>324</b>	<b>500</b>

*Sumber Data : Pemerintah Desa Massangkae dan beberapa sumber lainnya, (2021)*

Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh data bahwa dari 4 dusun yang ada di Desa Massangkae penduduk miskin lebih banyak pada Dusun Lagoppo I dengan jumlah kepala Keluarga 139 orang sementara terendah terdapa pada Dusun Hulo dengan jumlah kepala keluarga 110 orang.

#### *Sikap atau kecenderungan pelaksana*

Berbagai aspek yang menjadi perhatian pada pembangunan yang ada di desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, perluasan dan kesempatan dalam mengakses pendidikan, dan pelayanan masyarakat yang partisipatif tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya termasuk hak dalam menjalankan kehidupannya sebagai manusia. Kemudian dalam implementasi pelaksanaan SDGs Desa tanpa kemiskinan

Hal ini dicanangkan sebagai bagian dari upaya mencapai 2030 dengan tingkat kemiskinan di desa mencapai nol persen, oleh karena itu kepala desa di Kabupaten Bone mengatakan bahwa dibutuhkan seperangkat kebijakan yang mencakup semua stakeholder dalam pemerintahan mulai dari desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini akan dapat meningkatkan pendapatan bagi penduduk desa, memberikan akses bagi jaminan pelayanan dasar. Sementara itu rata-rata pendapatan perkapita pada tahun 2019 yaitu 913,649 yang dikategorikan miskin. Kemudian program yang dicanangkan pula oleh desa di Kabupaten Bone adalah BUMDes, Koperasi Desa, dan jaminan bagi aparat desa.

Di Desa Massangkae sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana khususnya di desa telah menggunakan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Hanya saja memahami dari SOP tersebut perlu difahami pula sebab karakteristik dan kondisi pelaksana dan masyarakat berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebutuhan dan lingkungannya sehingga implementasi SDG Desa tanpa kemiskinan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Van meter dan Van Horn (1975) yang dikutip (Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023) bahwa keberhasilan implementasi suatu program kegiatan ditentukan oleh karakteristik pelaksana. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi masyarakat di Desa Massangkae diharapkan memiliki kesadaran dalam berpartisipasi hanya saja program kegiatan SDGs Desa tanpa kemiskinan bersifat *top down* sehingga hal ini terkadang membuat masyarakat merasa tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan berdasarkan karakteristik permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan observasi yang telah saya lakukan tentang Implementasi Kebijakan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Massangkae dapat di simpulkan bahwa di Desa Massangkae SDGS Desa sudah di implementasikan di lihat dari pendataan yang di lakukan dalam 1 kali dalam 3 bulan dan di buktikan juga dengan hasil penelitian dari penulis. Persoalan pengimplementasian SDGs dalam mengurangi kemiskinan yaitu dalam hal meningkatkan pendapatan penduduk miskin, pemerintah Desa Massangkae hanya melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan. Seharusnya pemerintah Desa Massangkae membuat usaha untuk warga miskin agar masyarakat bisa keluar dari kemiskinan, menjamin akses terhadap pelayanan desa, tidak adanya pelatihan administrasi untuk aparat Desa Massangkae sehingga hanya sedikit orang yang mengatur persoalan akses pelayanan di Desa Massangkae.

## Kesimpulan

Pengimplementasian Kebijakan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui desa tanpa kemiskinan di Desa Massangkae, Kabupaten Bone telah di lakukan sesuai dengan surat edaran Kementrian Desa tentang pelaksanaan Program SDGs. Hasil dari data inilah yang menjadi acuan dari pemerintah itu sendiri untuk membuat perencanaan Desa mulai dari perencanaan pembangunan dan strategi yang harus dilakukan khususnya di bidang kemiskinan. Namun, pengimplementasian SDGs dalam mengurangi kemiskinan di Desa Massangkae

Kabupaten Bone belum efektif di lihat dari enam indikator konsep dan teori yang digunakan dimana pemerintah Desa Massangkae hanya melakukan satu kali pelatihan dan sampai sekarang pelatihan tersebut tidak berkelanjutan padahal tujuan dari SDGs desa tanpa kemiskinan merupakan agenda yang terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Desa Massangkae Kabupaten Bone. Pada penelitian ini pula ditemukan bahwa mekanisme koordinasi antar penyelenggara program masih rawan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan juga kepentingan dalam skala prioritas padahal suatu program akan terimplementasi dengan baik manakala tercipta suatu kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan.

## Referensi

- Ahmad & Kurtubi, Dodi. (2018). *Sustainable Goals (SDGs) dan pembangunan kesejahteraan sosial*. Satuan kerja perangkat daerah Website resmi Pemerintah Provinsi Riau diakses pada 26 mei 2020 pada pukul 20.00. <https://www.riau.go.id/home/skpd/partisipasi>
- Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 173. <http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Anas, A., & Abdullah, M. T. (2021). Kepemimpinan inovatif dalam pelaksanaan program swasembada pangan nasional di Kabupaten Bone. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 90–99. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.6091>
- Arwildayanto, A., Zubaidi, M., & Tuasikal, J. M. S. (2022). Pendampingan Manajemen Daya Saing Pemerintahan Desa Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 119. <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1523>
- Bakri, R., & Bernard Sagrim, Andi Sutra Rimba, M. J. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Policy Implementation of the Hope Family Program in the Bone Regency*. 2(2), 139–148.
- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals ( SDGs ) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *PROFESSIONAL: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(1), 109–116.
- Elih Yuliah. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.
- Hasan Warso Syahputra. (2021). PROSES INTEGRASI DAN IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (Sdgs) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, 2(1), 6–13. <https://doi.org/10.46730/jsdmu.v2i1.33>

- Hubbah, M. M. (2021). Dampak Medioker di Era Jokowi-Jk terhadap Welfare State Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional. *Rechtenstudent*, 1(3), 240–250. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.33>
- Linggarwati, T., Haryanto, A., Miryanti, R., & Darmawan, A. B. (2021). Implementasi SDGs Di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. *Prosiding Seminar Nasional Dan Callfor Papers*, 361–368. <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3415/mendes-pdtt-jadikan-sdgs-desa-sebagai-langkah>
- Rizayani, S., Syaharuddin, S., Handy, M. R. N., Abbas, E. W., & Jumriani, J. (2022). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kota Banjarbaru. *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(1), 74–82. <https://doi.org/10.20527/pakis.v2i1.5209>
- Rolifola Cahya Hartawan, & Fitriyani Kosasih. (2023). Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(4), 1348–1358. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i4.373>
- Rorong, M. M., Arie Junus Rorong, & Y.Londa, V. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Walewangko Kecamatan Langowan Barat. *Jurnal Administrasi ....* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/19242/18793>
- Solomon, B. D., Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Sustainable Development Goals (SDGs). *PROFESSIONAL: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(1), 526–527. <https://doi.org/10.4337/9781788974912.S.104>
- Zaini, I. F. (2021). *Kebijakan Sustainable Goals (SDGS) dalam Penggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa*.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2016). [Online] Available at Diakses 21 juni 2016. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/10/kamus-besar-bahasa-indonesia-edisi-kelima-tersedia-secara-daring>